



1.01%

SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 9 DEC 2024, 2:36 PM

Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

 **CHANGED TEXT**
1.01%

Report #24088869

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kerja Profesi Bidang pekerjaan sangat beragam, namun pada era digital dan serba computer seperti saat ini pekerja dalam bidang ilmu teknologi sedang sangat dibutuhkan dan populer saat ini. Peralnya hampir semua industry pekerjaan menerapkan konsep yang terkomputerisasi dalam aktivitasnya. Lowongan pekerjaan yang berbasis ilmu computer dan teknologi berterbaran dimana-mana. Menjadi point tambahan bagi perusahaan bilamana calon pekerjanya mampu dan ahli dalam mengoperasikan computer bahkan hingga ke struktur jaringan. Oleh karenanya ada banyak universitas yang melakukan kerja profesi demi menunjang mahasiswanya agar mampu dan siap bekerja pada bidang industry yang sesuai dengan keahliannya. Dalam aktivitasnya, mahasiswa diharap mampu dalam mengaplikasikan ilmu yang diterimanya selama masa perkuliahan kedalam tempat dimana mahasiswa melakukan kerja profesi tersebut. Ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa dalam mengembangkan karirnya supaya dapat menjadi ahli dan professional dalam bidangnya. Tidak sedikit pula perusahaan atau instansi yang menarik Kembali mahasiswanya setelah lulus kuliah untuk dapat bekerja Bersama mereka dengan penawaran keuntungan yang setimpal. Sehingga program kerja profesi memiliki banyak benefit yang didapat baik bagi mahasiswa maupun perusahaan tempat dimana mahasiswa melakukan praktik kerja profesi. Dalam pembuatan laporan, mahasiswa yang berlaku

sebagai praktikan akan menganalisis sebuah aplikasi yang merupakan gagasan daripada sebuah instansi pemerintahan dan merupakan aplikasi yang diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia dalam menyimpan dan mengelola dokumen kependudukannya. Aplikasi tersebut Bernama Identitas Kependudukan Digital atau disingkat IKD. Apa itu IKD dan bagaimana cara kerjanya semua akan dibahas satu per satu disini. **3 1.2 Maksud dan Tujuan**

Kerja Profesi 1.2 1 Maksud Kerja Profesi Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat diperlukan penerapan keahlian dan ilmu pengetahuan khusus dengan berlandaskan pada kode etik dan standar professional merupakan maksud dari kerja profesi itu sendiri. Kerja profesi mengacu pada pelaksanaan berbagai tugas yang membutuhkan keahlian, pengetahuan, serta kompetensi khusus dalam suatu bidang tertentu, yang biasanya mencakup tanggung jawab etis dan penerapan standar profesional. Dalam kerja profesi, individu diharapkan untuk mengikuti etika professional, menjaga tingkat kualitas dan Kepatuhan terhadap standar tertentu menjadi hal penting dalam menjalankan tugas. Praktik kerja profesi ini berfungsi sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri, memahami risiko, dan menyadari tanggung jawab yang akan dihadapinya. **1.2.2 Tujuan Kerja Profesi** Sebagai bahan materi persiapan saat akan memasuki dunia kerja yang dipilih oleh mahasiswa. Sehingga dengan melakukan praktik kerja profesi, diharapkan mahasiswa mampu beradaptasi dengan dunia kerja yang sejatinya untuk itulah ditempuhnya Pendidikan selama masa perkuliahan. Dengan praktik kerja profesi, mahasiswa juga mampu mengembangkan apa saja yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan dan terlibat langsung dalam praktik dunia kerja. Kerja profesi memiliki beberapa tujuan untuk mahasiswa yaitu : 1) Mengaplikasikan Ilmu yang Diperoleh Pengaplikasian ilmu pengetahuan oleh mahasiswa selama masa kerja profesi saat masa perkuliahan ke dalam situasi nyata. Pengalaman ini membantu mahasiswa memahami cara memanfaatkan teori dan konsep untuk menyelesaikan permasalahan serta memberikan solusi yang relevan. 2) Memperoleh

Pengalaman Kerja Melalui praktik ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja yang bernilai. Pengalaman ini menjadi bekal penting yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Selain itu, pengalaman tersebut turut berkontribusi dalam pengembangan keterampilan dan peningkatan kemampuan mahasiswa.

3) Membangun Jaringan Professional Selama masa kerja profesi, mahasiswa tentu juga berkesempatan membangun jaringan professional dengan para professional di bidangnya. Jaringan ini nantinya dapat membantu mahasiswa mendapatkan informasi terkait peluang kerja, serta mendapatkan mentor dan sponsor.

4) Meningkatkan Keterampilan dan Kemampuan Praktik kerja profesi ini juga berguna untuk mahasiswa dalam meningkatkan soft skill, keterampilan serta kemampuan mereka seperti komunikasi, team work dan problem solving. Keterampilan ini sangat penting demi upaya menyokong kesuksesannya di masa mendatang dalam dunia kerjanya. P a g e | 1

5) Memperkuat Minat dan Bakat Kerja profesi dapat membantu mahasiswa dalam hal ini adalah praktikan dalam memperkuat minat serta bakat mereka pada bidang tertentu. Hal ini dapat membantu mahasiswa untuk lebih yakin dalam memilih karir yang tepat setelah lulus.

6) Meningkatkan Daya Saing Pada era globalisasi seperti saat ini, daya saing menjadi sangat krusial untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai minat. Memiliki pengalaman kerja dapat menjadi nilai tambah serta dapat meningkatkan daya saing mahasiswa dalam dunia kerja.

1.3 Tempat Kerja Profesi Sama seperti PKL atau Praktik Kerja Lapangan yang umumnya dilakukan oleh pelajar menengah kejuruan (SMK), kerja profesi memiliki mekanisme yang serupa. Tergantung keahlian dan bidang yang dipelajari, tempat kerja profesi pun dapat beragam seperti di perkantoran baik instansi swasta maupun pemerintahan hingga perusahaan profit ataupun non profit. Untuk bidang sistem informasi sendiri dapat dilakukan dimana saja selama perusahaan tersebut memiliki sistem pekerjaan yang jelas dan diutamakan yang memiliki sistem yang terkomputerisasi dan jaringan internet sebagai aktivitas sehari-harinya.

Dalam tempat kerja profesi penulis, penulis melakukan kerja profesi di sebuah instansi pemerintahan yang dimana instansi ini merupakan induk dari database penduduk Indonesia khususnya warga Jakarta Selatan yaitu DUKCAPIL. Dukcapil sendiri merupakan singkatan daripada kependudukan dan pencatatan sipil, dibawah pemerintahan Suku Dinas DUKCAPIL Jaksel, penulis ditugaskan untuk melakukan kerja profesi di Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan. Tugas daripada dukcapil sendiri tidak hanya melakukan penyimpanan data, pembuatan dokumen seperti KTP, KK, Akta lahir dan mati serta surat pindah dan datang. Namun juga melakukan pemadanan data penduduk, konversi NIK, pengaktifan dan penonaktifan NIK hingga konsolidasi data penduduk yang terindikasi duplikat atau ganda. Masih banyak tugas dukcapil yang tidak dapat di jabarkan secara keseluruhan karena cukup banyak, dan kesemua pekerjaan tersebut berbasis internet dan tersistem dalam komputer serta server database kependudukan. Dan juga akses untuk melakukan CRUD dalam database kependudukan hanya bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang dan dengan tanggung jawab yang mutlak.

1.4 Jadwal Pelaksanaan Kerja Profesi

Dengan menggunakan standart metode perkuliahan, dimana periode masa kerja profesi ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan lamanya. Secara mendetail kegiatan kerja profesi ini dilakukan mulai dari 3 Februari 2024 hingga 3 Mei 2024. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 123/M/KPT/2019 yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti, dibuat keputusan yang mengatur tentang jam-jam kerja untuk mahasiswa yang melakukan kerja profesi. Jam kerja selama 45 jam akan dihitung sebagai 1 SKS dengan durasi minimal satu bulan. Dalam aturan tersebut juga disebutkan bahwa jam kerja mahasiswa yang melakukan kerja profesi tidak lebih dari 8 jam lamanya.

| No | Jadwal Kerja Profesi Waktu Kerja Profesi (WIB) | Keterangan |
|----|--|---|
| 1 | Februari 07.30 – 16.00 | Senin – Jumat (dipotong Isra Mi'raj, Imlek dan Pemilu) |
| 2 | Maret 07.30 – 16.00 | Senin – Jumat (dipotong Hari Raya Nyepi, Wafat Isa Almasih dan Kebangkitan Isa Almasih) |
| 3 | April | |

07.30 – 16.00 Senin – Jumat (dipotong Hari Raya Idul Fitri 1443 H

) 4 Mei 07.30 – 16.00 Senin – Jumat (dipotong Hari Buruh Internation

al) Page | 2 BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI 2.1

Sejarah Perusahaan Kependudukan warga negara Indonesia harus tercatat dalam database kependudukan di DINAS DUKCAPIL dibawah naungan KEMENDAGRI. Karena dokumen yang diterbitkan oleh DUKCAPIL merupakan bukti legalitas bahwa penduduk tersebut adalah benar warga negara Indonesia (WNI) yang tercatat dalam database kependudukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan perkembangannya, Jakarta sebagai ibu kota negara telah mengalami beberapa perubahan nama dalam sejarahnya, termasuk pada institusi yang mengelola administrasi kependudukan, yaitu Dukcapil DKI Jakarta. Pada abad ke-19, Batavia (nama lama Jakarta) mengalami perubahan signifikan, terutama di bidang pemerintahan. Administrasi kependudukan pertama kali diorganisir melalui lembaga yang dikenal sebagai Burgerlijke Stand sekitar tahun 1829, yang diatur berdasarkan perundang-undangan Belanda dan hanya berlaku untuk warga negara Belanda, Eropa, dan Amerika yang tinggal di Indonesia. Ketika masa pendudukan Jepang (1942-1945), Burgerlijke Stand diubah menjadi Cacah Jiwa, dengan lembaga pelaksanaanya dinamakan Kantor Pencacah Jiwa. Istilah "jiwa" merujuk pada konsep dalam hukum perdata yang mengartikan pencatatan sipil sebagai pendaftaran jiwa. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh pemerintah Indonesia, meskipun lembaga lama tetap melanjutkan beberapa tugasnya. Nama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara resmi diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia pada Kongres Bahasa II di Medan tahun 1950. Perubahan besar lainnya terjadi pada era Orde Baru, ketika melalui Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/In/U/12/66, layanan pencatatan sipil diperluas untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia tanpa memandang kewarganegaraan, memberikan dasar hukum baru yang mendorong kemajuan dalam sistem pencatatan sipil nasional. Dengan adanya perkembangan dalam administrasi kependudukan, pemerintah

Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi layanan dengan menyesuaikan sistem pencatatan sipil sesuai kebutuhan masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga kebutuhan untuk menciptakan layanan yang inklusif dan modern. Hal ini terlihat dari perluasan cakupan layanan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk Indonesia melalui kebijakan yang diterapkan pada era Orde Baru, yang kemudian menjadi fondasi bagi pengelolaan administrasi kependudukan berbasis digital di masa kini. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada keterbukaan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat luas.

2.2 Struktur Organisasi Dalam pemerintahan terdapat juga struktur organisasi yang terorganisir secara struktural mulai dari Kepala Dinas pada posisi tertinggi dalam struktur organisasi hingga Operator Komputer tingkat kelurahan pada posisi paling bawah yang bertugas melayani warga dan sebagai front office dalam pemerintahan. Masing-masing bagian mempunyai kepala tersendiri seperti kepala bagian, kepala sub unit, kepala uptik dan upak, kepala sektor hingga kepala satuan pelayanan tingkat kelurahan. Semua memiliki peranan masing-masing yang akan saling berkoordinasi dalam pelayanan sehari-hari. Dengan struktur organisasi yang mengerucut keatas, akan mempermudah pelayanan dan memberikan wewenang sesuai dengan tupoksi dari masing-masing divisi. Gambar diatas merupakan representasi dari struktur organisasi yang berada dalam lingkungan Dukcapil. Dari gambar diatas terlihat jelas struktur mulai dari yang paling tinggi hingga yang terendah beserta dengan keterangan jabatannya.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan Dukcapil beserta kemandagri bertugas dan berfungsi sebagai pembuat dokumen legal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan landasan hukum yang jelas, maka dukcapil diberi kewenangan oleh kemandagri dalam pengurusan dokumen kependudukan, seperti ; penerbitan KTP, KK, Akta Lahir dan Mati, Surat Pindah-Datang. Namun di zaman digitalisasi seperti ini, Dukcapil juga membuat inovasi dengan membuat

aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD. IKD sendiri akan berfungsi sebagai pengganti KTP atau identitas digital bagi masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat Indonesia yang selalu membawa gadget ataupun smartphone kemanapun berpergian, sehingga tidak akan pernah ketinggalan dalam membawa identitas. Didalam aplikasi IKD ini juga terdapat menu penggantian password/sandi, no. hp dan email, sehingga dapat dimodifikasi kapanpun sesuai keinginan user. Serta tombol penguncian aplikasi dalam rangka menjaga data pribadi agar tetap terjaga kerahasiaannya. Selain itu aplikasi ini mudah untuk dimigrasi selama no. hp, email dan sandi yang terdaftar tidak lupa oleh pengguna. Mereka dapat memindahkan data pribadinya ke device Page | 3 lainnya yang compatible dengan aplikasi ini hanya dengan memasukkan data pribadi dan sandi yang terdaftar ke aplikasi IKD di hp lainnya atau device barunya tanpa perlu registrasi ulang. Dan setelah data berhasil masuk di device lainnya maka data dalam device yang sebelumnya akan otomatis keluar atau logout dan tidak bisa masuk Kembali kecuali dimasukkan data yang sama. Hal tersebut memudahkan pengguna bilamana device yang dimilikinya hilang ataupun rusak tanpa perlu melakukan pendaftaran ulang ke dukcapil. 1 Page | 4 BAB III

PELAKSANAAN KERJA PROFESI 3.1 Bidang Kerja Pada kerja profesi di Dukcapil Kecamatan Mampang Prapatan, bidang pekerjaan utama melibatkan pengelolaan dokumen kependudukan secara digital, terutama melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Implementasi teknologi ini menggunakan konsep Enterprise Application Management (EAM), di mana sistem IKD menjadi aplikasi utama yang mengelola data warga secara real-time. EAM ini berfungsi untuk memastikan bahwa data kependudukan di seluruh wilayah dapat diakses dan diperbarui melalui satu platform digital yang terintegrasi. Perkembangan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) memainkan peran penting dalam transformasi dari sistem manual ke digital, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan mempercepat pengolahan data. Di sisi lain, Business Intelligence (BI) digunakan untuk memantau

seberapa efektif sistem IKD diterapkan di berbagai daerah melalui dashboard analitik yang memperlihatkan data aktivasi IKD dari setiap kecamatan hingga kelurahan. Walaupun Dukcapil merupakan DINAS sendiri, namun DINAS Dukcapil berada dibawah naungan KEMENDAGRI. Aktivitas sehari-harinya adalah membuat dokumen kependudukan dan menerbitkannya. Mulai dari membuat Akta Kelahiran hingga KIA, KTP, KK, Surat Pindah dan Datang, Akta Perkawinan dan Perceraian (bagi non-muslim) hingga Akta Kematian. Dukcapil selalu ada dalam setiap peristiwa kehidupan manusia mulai dari manusia tersebut dilahirkan hingga meninggal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas utama untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam BAB X, Bagian Kesatu Pasal 584. Untuk menjalankan tugas ini, fungsi yang diemban meliputi: 1. Merumuskan kebijakan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data administrasi kependudukan, integrasi data nasional, serta standar kualifikasi SDM pelaksana Administrasi Kependudukan. 2. Melaksanakan kebijakan di bidang yang sama, termasuk integrasi data nasional dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 3. Melakukan pembinaan dan koordinasi terkait pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan integrasi data secara nasional. 4. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam administrasi kependudukan. 5. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. 6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. 7. Menjalankan administrasi internal Direktorat Jenderal. 8. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Diatas merupakan tugas dan fungsi dari dukcapil yang mana semua pasal tersebut diatur dalam undang-undang KEMENDAGRI. Segala aturan dan tata cara telah diatur sebagaimana fungsinya demi memenuhi kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat

Indonesia. Segala aturan dan kebijakan dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat Indonesia dalam mengurus dokumen kependudukannya, bahkan Dukcapil dan KEMENDAGRI bersinergi membangun teknologi yang dapat memudahkan masyarakat Indonesia dalam membawa dokumen kependudukannya dalam 1 aplikasi yang bernama Identitas Kependudukan Digital atau IKD. 3.2 Pelaksanaan Kerja Dukcapil bekerja dengan struktur organisasi yang terpusat. Mulai dari tingkat DINAS, SUDIN, Kecamatan hingga Kelurahan. Elemen paling bawah adalah Kelurahan yang melayani langsung masyarakat dan bersinergi Bersama perangkat desa dan kelurahan seperti RT dan RW. Pelaksanaan kerja profesi di Dukcapil tidak hanya melibatkan pengolahan dokumen manual, tetapi juga pemanfaatan Enterprise Resource Planning (ERP), di mana seluruh proses administratif dikoordinasikan melalui sistem ERP berbasis TIK. ERP ini mencakup modul-modul terkait pengelolaan data kependudukan, pencatatan akta, dan penerbitan dokumen seperti KTP dan KK. Implementasi sistem ini mempercepat proses verifikasi dan pencatatan data warga. Selama pelaksanaan kerja profesi, penulis terlibat dalam berbagai aspek manajemen aplikasi IKD, yang mencakup Enterprise Application Management untuk memantau kinerja sistem, serta penggunaan Business Intelligence untuk analitik data penduduk yang sudah mengaktifasi IKD. BI digunakan untuk membuat laporan mingguan mengenai tingkat aktivasi IKD dan kendala teknis yang dihadapi. 3.2.1 Analisis P a g e | 5 Pada sub bab ini, akan dibahas secara rinci mengenai analisis dari implementasi Sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD). Analisis ini bertujuan untuk memahami struktur fungsional dan alur kerja dari aplikasi IKD dalam mendukung proses identifikasi penduduk secara digital, serta mengidentifikasi pencapaian-pencapaian penting dalam pengembangan dan pemanfaatannya. Pembahasan pertama dimulai dengan use case diagram , yang menggambarkan interaksi antara aktor, baik pengguna maupun admin, dengan fitur-fitur utama dalam aplikasi IKD. Diagram ini menjelaskan skenario-skenario penting yang memungkinkan pengguna dan admin untuk melaksanakan tugas-tugas terkait proses

verifikasi, registrasi, dan akses data kependudukan secara digital. Setelah pembahasan mengenai Use Case Diagram, akan disajikan Activity Diagram yang bertujuan untuk memperjelas alur aktivitas yang terjadi dalam setiap skenario utama penggunaan aplikasi IKD. Diagram aktivitas ini berfungsi sebagai pemetaan visual dari langkah-langkah yang dilalui pengguna atau admin dalam melaksanakan tugas tertentu, seperti proses registrasi, verifikasi, login, dan aktivasi akun. Activity Diagram ini akan menunjukkan urutan kegiatan, percabangan keputusan, serta kondisi yang dapat terjadi pada tiap proses. Dengan adanya diagram aktivitas, alur kerja yang kompleks dapat digambarkan secara sistematis sehingga memudahkan dalam memahami setiap langkah operasional yang dijalankan oleh pengguna maupun admin. Diagram ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana sistem menanggapi setiap aksi yang dilakukan pengguna, baik pada proses awal pendaftaran maupun saat mengelola data yang telah diverifikasi. Selanjutnya, akan disajikan tampilan aplikasi IKD yang memberikan visualisasi dari antarmuka yang dihadirkan kepada pengguna. Bagian ini akan menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi langsung dengan aplikasi, mulai dari dashboard, dokumen digital, data keluarga, hingga pengelolaan data kependudukan, guna memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan lancar dan intuitif. Selain itu, sub bab ini juga mencakup diagram pencapaian IKD, yang menampilkan berbagai capaian penting dari penerapan teknologi digital dalam sistem kependudukan. Diagram ini menunjukkan hasil konkret dari pengembangan aplikasi. Dengan adanya analisis yang menyeluruh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas, kemudahan penggunaan, dan keberhasilan implementasi Sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam membantu transformasi digital di bidang administrasi kependudukan.

3.2.1.1 Use Case Diagram

Bab ini menjelaskan Use Case Diagram yang berfungsi untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan fitur-fitur utama dalam aplikasi Sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD). Use Case Diagram merupakan komponen penting dalam analisis sistem karena membantu

memetakan kebutuhan fungsional dan alur interaksi yang terjadi antara aktor- aktor utama, yaitu pengguna dan admin, dengan sistem IKD. Dalam konteks aplikasi IKD, Use Case Diagram ini memperlihatkan proses-proses utama, seperti pendaftaran, verifikasi data, login, dan akun dashboard , yang dirancang untuk mendukung pelayanan kependudukan secara digital dan efisien. Diagram ini menunjukkan peran masing-masing aktor dalam melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan identifikasi digital dan manajemen data penduduk. Dengan adanya Use Case Diagram , akan lebih mudah untuk memahami peran dan tanggung jawab dari setiap aktor dalam sistem serta bagaimana sistem merespons setiap aktivitas yang dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aplikasi IKD mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan berjalan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Setelah memahami gambaran umum dari interaksi aktor dengan sistem melalui Use Case Diagram , selanjutnya akan dijelaskan secara rinci setiap use case dalam bentuk tabel Use Case Description . Tabel ini menyajikan deskripsi lebih mendetail mengenai setiap skenario penggunaan, termasuk tujuan, aktor yang terlibat, prasyarat, langkah-langkah proses, dan hasil yang diharapkan dari masing-masing use case . Dengan adanya Use Case Description ini, penulis berharap dapat memahami alur lengkap dan spesifikasi dari setiap proses yang ada dalam aplikasi IKD, sehingga dapat mendukung analisis sistem secara lebih komprehensif.

Tabel 3.1 Login IKD Use Case Login Deskripsi

Pengguna melakukan login untuk mengakses dashboard IKD. Aktor User Page | 6

Precondition Pengguna sudah terdaftar pada sistem IKD.
Postcondition Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke dashboard.

Alur Utama

1. Pengguna membuka aplikasi IKD.
2. Sistem memvalidasi device .
3. Pengguna memasukkan pin IKD.
4. Sistem memverifikasi pin.
5. Jika valid , pengguna diarahkan ke dashboard .

Alur Alternatif 2a.

Jika device belum tercatat dalam database sistem, sistem menampilkan tombol daftar dan meminta pengguna untuk mendaftar.

2b. Jika device belum tercatat dalam database sistem namun pengguna sudah terdaftar

dalam database sistem, sistem menampilkan tombol daftar dan meminta pengguna untuk memasukkan credential atau data yang terdaftar dan mengkonfirmasi untuk pemindahan data ke device yang baru dan meminta kode pin yang sudah dibuat sebelumnya. 4a. Jika pin salah, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna untuk mencoba lagi. Tabel

3.2 Register IKD Use Case Register Deskripsi Pengguna baru melakukan registrasi untuk mendapatkan akses ke sistem IKD. Aktor User Precondition Pengguna belum terdaftar dalam sistem IKD. Postcondition Akun pengguna berhasil dibuat, menunggu verifikasi. Alur Utama 1. Pengguna mengklik "Daftar" di aplikasi. 2. Pengguna mengisi data diri yang dibutuhkan, seperti NIK, email, dan No. HP. 3. Pengguna mengklik "Verifikasi" setelah mengisi data 4. Pengguna mengunggah foto diri untuk verifikasi. 5. Sistem memverifikasi data pengguna dan meminta untuk scan barcode oleh admin. Alur Alternatif 2a. Jika data tidak lengkap atau tidak sesuai, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna untuk menyesuaikan atau melengkapi informasi dan tidak bisa mengklik tombol verifikasi sebelum data sesuai dan lengkap. Tabel

3.3 Verifikasi Data IKD Use Case Verifikasi Data Deskripsi Petugas dukcapil melakukan verifikasi scan barcode terhadap data pengguna yang baru melakukan registrasi. Aktor User dan Admin Precondition Pengguna baru telah melakukan registrasi. Postcondition Data pengguna diverifikasi dan pengguna dapat menggunakan sistem. Alur Utama 1. Petugas Dukcapil mengklik "Scan Barcode" di aplikasi setelah foto diri. 2. Petugas Dukcapil men-scan barcode pada sistem SIAK. 3. Pengguna menerima email konfirmasi link dan OTP untuk aktivasi akun. 4. Pengguna mengklik "Link Aktivasi" pada email. 5. Pengguna memasukkan OTP dan captcha pada web kemendagri. 6. Sistem menyimpan data pengguna dan menandainya sebagai akun aktif. 7. Pengguna kembali ke aplikasi dan mengecek status kemudian masuk ke dalam akun dengan pin standar yang diberikan melalui email. 8. Pengguna melakukan penggantian pin pada menu pengaturan. Alur Alternatif 3a. Jika email

tidak masuk, pengguna akan meminta petugas dukcapil untuk menscan barcode link aktivasi secara manual melalui sistem SIAK. Tabel 3.4

User Dashboard IKD Page | 7 Use Case User Dashboard

Deskripsi Pengguna mengakses dashboard utama setelah berhasil login ke sistem IKD. Aktor User Precondition Pengguna sudah berhasil login.

Postcondition Pengguna dapat melihat dan mengakses berbagai fitur di dashboard.

Alur Utama 1. Pengguna memilih menu yang tersedia di dashboard IKD, seperti data pengguna, data keluarga, dokumen digital dan data kependudukan lainnya. Alur Alternatif - Tabel 3.5 Hapus

Pengguna IKD Use Case Hapus Pengguna Deskripsi Admin menghapus akun pengguna dari sistem IKD. Aktor Admin Precondition Akun pengguna

telah terdaftar dalam sistem. Postcondition Akun pengguna dihapus dan

tidak lagi bisa mengakses sistem. Alur Utama 1. Petugas dukcapil memilih pengguna yang ingin dihapus. 2. Petugas dukcapil mengonfirmasi penghapusan. 3. Sistem menghapus akun pengguna dari database.

Alur Alternatif 3a. Jika terjadi kesalahan, sistem menampilkan pesan error dan petugas dukcapil harus mengulang proses. 3.2.1.2 Activity Diagram

Pada bagian ini, akan dibahas Activity Diagram yang berfungsi untuk memvisualisasikan alur aktivitas atau proses yang terjadi dalam Sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD). Activity Diagram menggambarkan langkah-langkah operasional secara terperinci dalam setiap proses utama, seperti registrasi, verifikasi, login, hingga pengelolaan akun. Diagram

ini membantu memperjelas urutan aktivitas, pengambilan keputusan, dan aliran kerja dalam aplikasi IKD, sehingga lebih mudah untuk memahami bagaimana sistem merespons setiap aksi pengguna atau admin. Dengan

adanya Activity Diagram, dapat terlihat dengan jelas alur aktivitas yang kompleks dan berbagai skenario yang mungkin terjadi dalam

aplikasi, termasuk kondisi-kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi hasil dari sebuah proses. Penggambaran aktivitas yang sistematis ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Activity Diagram juga berfungsi

sebagai panduan dalam menganalisis dan mengembangkan sistem agar sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. 3.2.2 Mockup Aplikasi Bagian ini menyajikan Mockup Aplikasi yang menampilkan tampilan antarmuka dari aplikasi Sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD). Mockup ini memberikan gambaran visual mengenai desain dan layout aplikasi, termasuk halaman-halaman utama yang akan diakses oleh pengguna, seperti halaman dashboard, data diri, data keluarga, dokumen digital, dan halaman akun lainnya. Dengan mockup ini, pembaca dapat lebih mudah memahami bagaimana alur navigasi dan fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi IKD, serta bagaimana informasi ditampilkan secara visual. Mockup ini juga berfungsi sebagai acuan bagi pengembangan antarmuka pengguna (UI) yang intuitif dan user-friendly, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses layanan kependudukan secara digital. Gambar tersebut merupakan tampilan dari isi didalam IKD atau identitas kependudukan digital. Dari contoh diatas terlihat data pribadi dan keluarga, namun untuk akses KTP digital hanya dapat diakses dan didapatkan scan barcode nya bagi anggota keluarga yang sudah terdaftar dalam database IKD. Bagi anggota keluarga yang belum melakukan registrasi IKD, mereka tidak dapat melihat dan mendapatkan barcode dari KTP digital mereka. Untuk data sekeluarga dapat diakses melalui data keluarga, dan barcode kartu keluarga pun dapat diakses melalui dokumen kependudukan digital. Sehingga Page | 8 mempermudah masyarakat bilamana ingin melakukan pendaftaran yang memerlukan nomor kartu keluarga yang pastinya KK jarang sekali dibawa kemana-mana. Selain memberikan gambaran tampilan, mockup ini juga menunjukkan peran penting dari setiap elemen dalam aplikasi, baik untuk mempermudah proses verifikasi data maupun untuk memfasilitasi akses cepat ke berbagai fitur yang disediakan. Tampilan ini akan mendukung analisis lebih lanjut mengenai efektivitas dan fungsionalitas antarmuka aplikasi IKD. 3.2.3 Target Pencapaian IKD di Jakarta Selatan Pada sub-bab ini, disajikan visualisasi data terkait pencapaian target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) per

kecamatan dan kelurahan pada tanggal 1 Maret 2024. Diagram ini memberikan gambaran tentang seberapa jauh pencapaian aktivasi IKD di wilayah Jakarta Selatan, menyoroti persentase aktivasi di berbagai kecamatan dan kelurahan. Data ini bertujuan untuk membantu dalam evaluasi implementasi IKD dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivasi identitas digital.

3.3 Kendala Yang Dihadapi

Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kerja profesi terkait dengan keterbatasan komunikasi antara sistem ERP dan sistem IKD, terutama dalam hal integrasi data. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam update data kependudukan di tingkat kecamatan. Kendala lain adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi IKD, yang menimbulkan resistensi terhadap teknologi baru. Tantangan dari sisi Komputer & Masyarakat juga muncul karena tidak semua warga memiliki akses ke perangkat digital atau pengetahuan yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi IKD, yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan pendaftaran dan aktivasi.

3.4 Cara Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi masalah teknis pada integrasi sistem, tim IT Dukcapil mengadakan koordinasi dengan vendor penyedia Enterprise Resource Planning (ERP) guna memperbaiki proses sinkronisasi antara ERP dan sistem IKD. Dari sisi masyarakat, diadakan pelatihan singkat dan sosialisasi di kantor kelurahan mengenai cara menggunakan aplikasi IKD. Penggunaan Business Intelligence juga dioptimalkan untuk memantau efektivitas pelatihan masyarakat, dengan melihat apakah tingkat aktivasi IKD meningkat setelah pelatihan diadakan.

3.5 Pembelajaran Yang Diperoleh dari Kerja Profesi

Dari kerja profesi ini, penulis belajar mengenai bagaimana teknologi Enterprise Application Management dan ERP digunakan dalam administrasi publik, terutama dalam konteks kependudukan. Selain itu, penulis juga memahami pentingnya Business Intelligence dalam menganalisis data kependudukan secara cepat dan akurat, serta bagaimana komputer dan masyarakat perlu dipersiapkan dalam menghadapi transformasi digital yang

cepat. Penulis juga mendapatkan banyak wawasan penting mengenai penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sektor administrasi kependudukan. Pembelajaran ini mencakup beberapa aspek berikut: 1) Pemahaman Lebih Lanjut tentang Enterprise Application Management (EAM): Penulis mendapatkan pemahaman mendalam mengenai Enterprise Application Management (EAM) dan bagaimana sebuah instansi pemerintahan seperti Dukcapil mengelola sistem informasi yang kompleks. Sistem IKD (Identitas Kependudukan Digital) merupakan contoh nyata dari penerapan EAM yang memadukan data kependudukan dalam satu aplikasi digital yang terintegrasi dengan Enterprise Resource Planning (ERP). Melalui EAM, berbagai proses administratif, seperti pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen, dan pembaruan data, dikelola secara terstruktur dan terpusat, memberikan efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sistem manual. 2) Business Intelligence sebagai Alat Pengambilan Keputusan: Penggunaan Business Intelligence (BI) dalam sistem IKD memberikan wawasan baru tentang bagaimana data digunakan untuk analitik dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Melalui BI, penulis belajar bagaimana data yang dikumpulkan dari aktivasi akun IKD penduduk digunakan untuk memantau kinerja sistem, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan solusi berbasis data. Analisis BI membantu tim Dukcapil dalam meningkatkan efektivitas penerapan IKD di berbagai wilayah, termasuk dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat yang belum familiar dengan teknologi ini. 3) Pentingnya Peran ERP dalam Pengelolaan Dokumen Kependudukan: Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang digunakan di Dukcapil memungkinkan semua modul terkait pengelolaan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Akta Lahir, dan lainnya, diakses dan diperbarui secara real-time. Dari sistem ini, penulis belajar bagaimana ERP tidak hanya diterapkan P a g e | 9 dalam perusahaan komersial, tetapi juga memiliki peran besar dalam instansi pemerintahan, terutama untuk memastikan proses administrasi berjalan lancar dan data tersimpan secara terintegrasi. 4) Peran Teknologi Informasi dalam Pemberdayaan Masyarakat:

Penulis juga menyadari pentingnya komputer dan masyarakat dalam konteks transformasi digital. Sistem IKD memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara cepat melalui aplikasi mobile, tetapi keberhasilan adopsi teknologi ini sangat bergantung pada literasi digital masyarakat. Pengalaman ini mengajarkan penulis bahwa teknologi tidak hanya harus canggih, tetapi juga mudah diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

5) Peningkatan Keterampilan Komunikasi dan Kolaborasi: Selama masa kerja profesi, penulis berinteraksi dengan berbagai tim, baik dari sisi teknis (IT) maupun administratif, dan belajar cara berkomunikasi secara efektif dalam konteks proyek teknologi. Kolaborasi lintas divisi ini penting untuk memahami bagaimana berbagai sistem (seperti IKD, ERP, dan BI) saling terhubung dan bagaimana solusi teknis harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna akhir.

Page | 10 BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan Penerapan sistem IKD di Dukcapil Kecamatan Mampang Prapatan merupakan contoh bagaimana Perkembangan Teknologi Informasi & Komunikasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi publik. Dengan menggunakan teknologi ERP dan Enterprise Application Management, proses pengelolaan dokumen kependudukan menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan akurat. Business Intelligence memegang peran penting dalam memantau kemajuan sistem dan tingkat penerimaan teknologi oleh masyarakat. Secara umum, kerja profesi ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam sistem kependudukan membawa manfaat besar, namun juga menimbulkan tantangan dari sisi teknis dan sosial, terutama dalam hal edukasi masyarakat mengenai penggunaan teknologi digital. Dari pelaksanaan kerja profesi di Dukcapil Kecamatan Mampang Prapatan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi layanan publik melalui sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan langkah maju yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan. Sistem IKD tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengelola dokumen kependudukan mereka, tetapi juga membantu pemerintah dalam mengurangi biaya cetak fisik, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat pelayanan. Penerapan

Enterprise Resource Planning (ERP) dan Enterprise Application Management (EAM) yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik dan terpusat. Hal ini mendukung kelancaran operasional Dukcapil dalam melayani penduduk secara cepat dan akurat. Sistem ERP memfasilitasi proses pengolahan dokumen, sementara EAM menjaga agar semua aplikasi terkait berjalan dengan baik. Business Intelligence (BI) memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, baik dalam memantau tingkat aktivasi IKD maupun dalam menganalisis kendala yang dihadapi oleh penduduk dalam menggunakan aplikasi. Penggunaan BI memperlihatkan bagaimana analitik data dapat membantu mempercepat implementasi kebijakan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Namun, transformasi digital ini juga menghadapi tantangan dari segi Komputer & Masyarakat. Tidak semua warga memiliki literasi digital yang memadai, dan akses ke perangkat teknologi masih menjadi kendala di beberapa kalangan. Oleh karena itu, dukungan berupa pelatihan dan peningkatan literasi digital sangat diperlukan agar masyarakat dapat sepenuhnya memanfaatkan teknologi yang ada. Secara keseluruhan, digitalisasi melalui sistem IKD merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi kesuksesannya memerlukan integrasi yang kuat antara teknologi, kebijakan pemerintah, dan kesiapan masyarakat untuk mengadopsi teknologi tersebut.

4.2 Saran Beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Integrasi Sistem: Dukcapil perlu meningkatkan integrasi antara sistem ERP dan sistem IKD untuk memastikan update data secara real-time di seluruh wilayah.
2. Pendidikan Digital untuk Masyarakat: Sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut perlu dilakukan agar masyarakat lebih siap menghadapi Perkembangan Teknologi Informasi & Komunikasi, khususnya dalam penggunaan aplikasi IKD.
3. Pengembangan Business Intelligence: Dukcapil dapat lebih mengoptimalkan penggunaan Business Intelligence untuk memantau kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengadopsi teknologi ini, sehingga bisa dilakukan perbaikan yang tepat sasaran.
4. Pemanfaatan Komputer Secara Berkelanjutan: Masyarakat harus

REPORT #24088869

terus diberikan akses kepada teknologi komputer dan internet agar mereka tidak tertinggal dalam penerapan sistem digital seperti IKD. Page | 11



REPORT #24088869

Results

Sources that matched your submitted document.

● IDENTICAL ● CHANGED TEXT

| | |
|---|---|
| INTERNET SOURCE | |
| 1. 0.67% eprints.upj.ac.id | ● |
| https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/1542/14/13%20BAB%20III.pdf | |
| INTERNET SOURCE | |
| 2. 0.24% organisasi.tebingtinggikota.go.id | ● |
| https://organisasi.tebingtinggikota.go.id/wp-content/uploads/2021/12/SALINAN... | |
| INTERNET SOURCE | |
| 3. 0.09% kerma.esaunggul.ac.id | ● |
| https://kerma.esaunggul.ac.id/upload/kerjasama/3557-Laporan%20Magang%20.. | |